

Analisis Dinamika Nilai Tukar Petani di Provinsi Nusa Tenggara Timur: Implikasi Terhadap Kesejahteraan Petani dan Kebijakan Pertanian

Maria Gratia Fernandez

¹Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia

[‡]Korespondensi Penulis: E-mail address: maria.gf@bps.go.id

ARTIKEL INFO

Abstract

Article history:

Received 22 Oct, 2025

Revised 17 Nov, 2025

Accepted 22 Dec, 2025

Published 31 Dec, 2025

Introduction: This study aims to analyze the dynamics of Farmer Terms of Trade (FTT) in Nusa Tenggara Timur (NTT) Province and its implications for farmer welfare and agricultural policy formulation. **Background Problem:** NTT Province, despite being an agricultural-based region contributing 28.83% to regional GDP, faces persistent challenges in farmer welfare as indicated by fluctuating FTT values. The monthly FTT data from January to August 2025 shows volatility with values ranging from 99.08 to 101.93, frequently falling below the break-even point of 100, indicating that farmers experience deficit conditions where production costs exceed income. **Novelty:** This research provides a comprehensive analysis of subsectoral FTT dynamics in NTT Province identifying specific variations across five agricultural subsectors (food crops, horticulture, plantation crops, livestock, and fisheries) and proposing targeted policy interventions based on empirical evidence from recent data spanning January- August 2025. **Research Method:** This study employs descriptive statistical analysis using secondary data from the BPS-Statistics NTT Province. The analysis includes monthly FTT calculations, subsectoral decomposition, price index received (IT) and price index paid (IB) by farmers, and comparative analysis across different agricultural subsectors during the period of January-August 2025. **Result:** The research reveals that: (1) FTT in NTT Province experienced significant fluctuations with an overall declining trend from January (101.60) to July 2025 (99.08) before recovering in August (101.93); (2) Livestock subsector demonstrated the highest FTT at 107.89, while fisheries recorded the lowest at 93.44; (3) The volatility in FTT is primarily driven by faster increases in the price index paid by farmers compared to the price index received, particularly affecting production costs; (4) Four subsectors (food crops, horticulture, plantation crops, and fisheries) consistently recorded FTT values below 100, indicating welfare challenges; (5) Rural deflation of -0.35% in June 2025 significantly impacted farmer purchasing power.

Keywords:

Agricultural welfare; Farmer Terms of Trade; NTT Province

1. Pendahuluan

Sektor pertanian memegang peran strategis dan merupakan tulang punggung perekonomian Provinsi NTT. Provinsi NTT dikenal sebagai provinsi yang mengandalkan ekonomi berbasis pertanian, dengan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan

menyumbang 28,83% kepada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada Triwulan I-2025 (Pemerintah Provinsi NTT, 2024). Namun demikian, besarnya kontribusi sektor pertanian dalam struktur ekonomi Provinsi NTT tidak secara otomatis menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang baik. Salah satu indikator kunci untuk mengukur kesejahteraan petani adalah Nilai Tukar Petani (NTP), yang merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dengan indeks harga yang dibayar petani (IB) (Keumala & Zainuddin, 2018).

NTP secara sederhana membandingkan indeks harga yang diterima petani atas hasil jual produknya dengan indeks harga yang harus mereka bayar untuk kebutuhan konsumsi dan produksi (Keumala & Zainuddin, 2018). NTP menunjukkan kemampuan tukar produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun yang digunakan dalam proses produksi pertanian. NTP di atas 100 menandakan surplus atau peningkatan kesejahteraan, sementara nilai di bawah 100 mengindikasikan penurunan kesejahteraan. Namun, pencapaian NTP yang stabil dan menguntungkan petani di Provinsi NTT menghadapi berbagai tantangan kompleks. Provinsi dengan karakteristik geografis kepulauan dan beriklim kering ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kekeringan yang dapat menurunkan produktivitas. Disamping itu, fluktuasi harga komoditas di tingkat petani dan inefisiensi dalam rantai pasokan serta pasar menambah ketidakpastian pendapatan para petani.

Oleh karena itu, sebuah penelitian yang mendalam mengenai dinamika NTP di Provinsi NTT menjadi sangat mendesak. Penelitian semacam itu tidak hanya untuk memetakan tren dan fluktuasi NTP dari waktu ke waktu, tetapi juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor komoditas spesifik mana yang paling berpengaruh. Hasil dari analisis tersebut akan memberikan dasar yang kuat dan berbasis data bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pertanian yang tepat sasaran. Tujuannya adalah untuk melindungi kesejahteraan petani, meningkatkan ketahanan sektor pertanian, dan pada akhirnya mengukuhkan kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Provinsi NTT secara berkelanjutan.

Berdasarkan peran strategis sektor pertanian sebagai penopang perekonomian Provinsi NTT yang berkontribusi cukup besar dibandingkan sektor lain, maka kesejahteraan petani menjadi indikator kunci keberhasilan pembangunan daerah. NTP berfungsi sebagai alat ukur fundamental untuk menilai tingkat kesejahteraan petani dengan membandingkan indeks harga yang diterima terhadap indeks harga yang dibayarkan. Namun, pencapaian NTP yang optimal di Provinsi NTT menghadapi tantangan kompleks berupa karakteristik geografis yang rentan terhadap perubahan iklim, fluktuasi harga komoditas, dan inefisiensi rantai pasokan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis dinamika dan pola fluktuasi NTP di Provinsi NTT yang menunjukkan volatilitas cukup tinggi dengan tren menurun dalam periode tertentu. Penelitian juga mengkaji faktor-faktor determinan yang mempengaruhi fluktuasi NTP, khususnya dinamika indeks harga yang

diterima dan dibayar petani, termasuk harga input produksi dan harga jual komoditas. Analisis variasi NTP antar subsektor pertanian menjadi penting mengingat adanya disparitas signifikan dimana hanya subsektor peternakan dan perkebunan yang konsisten berada di atas ambang kesejahteraan. Fenomena deflasi perdesaan dan inflasi perkotaan turut dikaji dampaknya terhadap daya beli petani. Secara normatif, penelitian ini bertujuan merumuskan rekomendasi kebijakan dan strategi untuk menstabilkan dan meningkatkan NTP guna mendukung kesejahteraan petani dan pembangunan pertanian berkelanjutan di Provinsi NTT.

NTP telah menjadi indikator kesejahteraan petani yang banyak diteliti di Indonesia. Keumala dan Zainuddin (2018) mendefinisikan NTP sebagai perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (IT) dan indeks harga yang dibayar petani (IB), di mana nilai di atas 100 menunjukkan surplus. Penelitian sebelumnya menunjukkan faktor harga seperti harga jual produk dan pupuk lebih dominan mempengaruhi NTP daripada faktor produksi (Nirmala et al., 2016), sementara Indeks Harga Konsumen dan Produk Domestik Bruto sektor pangan berpengaruh positif dalam jangka panjang (Aulia dan Santiuli, 2021).

Dalam konteks regional, penelitian Maria et al. (2025) di Provinsi NTT menemukan fluktuasi harga beras dan cabai rawit berpengaruh signifikan terhadap NTP, serta ditemukan variasi pertumbuhan NTP antar subsektor di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Juliansyah, 2024). Metode analisis seperti ARIMA (*Autoregressive Integrated Moving Average*) telah terbukti akurat untuk peramalan NTP (Hablinawati et al., 2024). Pendekatan *time series* ini memungkinkan identifikasi pola dan tren NTP untuk peramalan jangka pendek. Sementara itu, pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi linear berganda juga banyak digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi NTP.

Namun, terdapat celah penelitian mengenai analisis komprehensif NTP di Provinsi NTT dengan karakteristik spesifiknya. Penelitian ini memiliki signifikansi teoritis dan praktis dengan kebaruan pada: (1) analisis subsektoral komprehensif periode 2025; (2) integrasi dengan fenomena deflasi/inflasi; (3) identifikasi pola fluktuasi dalam konteks perubahan pola konsumsi; dan (4) formulasi rekomendasi kebijakan yang spesifik. Penelitian ini juga mengisi gap metodologis dengan menggunakan pendekatan *mixed-methods* yang mengintegrasikan analisis statistik deskriptif dengan interpretasi kontekstual berbasis realitas sosial-ekonomi Provinsi NTT.

Tabel 1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan

No	Lapangan Usaha	Harga Berlaku			Harga Konstan		
		Tw I-2024	Tw IV-2024	Tw I-2025	Tw I-2024	Tw IV-2024	Tw I-2025
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, Dan Perikanan	9.253	10.212	9.901	5.001	5.394	5.215
B	Pertambangan dan Penggalian	348	359	342	225	235	225
C	Industri Pengolahan	478	481	513	254	248	257
D	Pengadaan Listrik dan Gas	29	34	31	19	21	21
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	19	19	21	15	14	16
F	Konstruksi	3.110	3.889	2.993	1.797	2.208	1.695
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.098	4.559	4.610	2.316	2.563	2.592
H	Transportasi dan Pergudangan	1.637	1.821	1.703	877	956	912
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	212	255	222	128	153	134
J	Informasi dan Komunikasi	2.321	2.367	2.395	1947	1961	1982
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.486	1.433	1.505	881	775	811
L	Real Estat	821	888	887	448	455	452
M,N	Jasa Perusahaan	821	888	887	448	455	452
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	49	53	53	26	27	27
P	Jasa Pendidikan	3.981	4.848	4.485	2.352	2.809	2.581
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.874	3.197	3.223	1.498	1.621	1.624
R,S,T,U	Jasa Lainnya	535	550	542	325	333	325
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)		32.128	35.929	34.343	18.500	20.286	19.342

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Metodologi

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dipilih untuk menggambarkan fluktuasi NTP di Provinsi NTT selama 8 bulan tahun 2025 secara sistematis dan objektif. Pendekatan ini memungkinkan analisis data numerik, seperti tren, rata-rata, dan variasi antar subsektor, tanpa asumsi kausal. Untuk memperkuat interpretasi dan temuan, analisis dilengkapi dengan grafik deskriptif untuk menggambarkan tren dan dinamika perubahan NTP. Keunikan studi ini terletak pada integrasi analisis subsektoral terkini, penggabungan harga yang diterima dan dibayar petani, serta visualisasi data yang tajam, memberikan wawasan mendalam dan rekomendasi berbasis data untuk kebijakan pembangunan pertanian yang lebih tepat sasaran. Selain itu, pemilihan data selama 8 bulan pertama di tahun 2025 mempertimbangkan keterbaruan data yang ada, sehingga analisis menjadi relevan untuk menggambarkan fluktuasi jangka pendek serta perubahan tren yang terjadi selama tahun berjalan.

2.1. Bahan dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT. Data utama mencakup NTP bulanan periode Januari-Agustus 2025 dengan tahun dasar 2018=100, yang meliputi NTP agregat dan lima subsektor pertanian: tanaman padi dan palawija, hortikultura, tanaman perkebunan rakyat, peternakan, dan perikanan. Data pendukung lainnya meliputi IT, IB, inflasi/deflasi, dan PDRB sektor pertanian. Seluruh data NTP bersumber dari Berita Resmi Statistik (BRS) yang diterbitkan secara berkala oleh BPS Provinsi NTT, yang dikumpulkan melalui Survei Harga Perdesaan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi NTT. Cakupan wilayah penelitian meliputi seluruh Provinsi NTT yang terdiri dari 21 kabupaten. Karakteristik data yang dianalisis terdiri dari 8 observasi bulanan dengan variabel utama NTP, IT, IB, dan perubahan bulanan (MoM). Data tambahan yang mendukung analisis kontekstual diperoleh dari publikasi BPS seperti Statistik Pertanian Provinsi NTT 2024 dan Profil Sektor Pertanian Provinsi NTT 2024.

2.2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan analisis statistik deskriptif untuk mengkaji dinamika NTP dan variasi antar subsektor pertanian di Provinsi NTT. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menyajikan data secara sistematis, mengidentifikasi tren, serta menginterpretasikan fenomena berdasarkan data empiris yang tersedia. Penelitian dimulai dari proses pengumpulan dan kompilasi data NTP bulanan dari sumber resmi BPS Provinsi NTT disertai validasi untuk memastikan akurasi. Kemudian analisis deskriptif temporal untuk mengidentifikasi pola dan tren NTP periode Januari-Agustus 2025 melalui perhitungan statistik deskriptif (rata-rata, minimum, maksimum, standar deviasi) dan analisis perubahan bulanan dengan bantuan visualisasi tren dalam bentuk. Setelah itu, dilakukan analisis subsektoral membandingkan kinerja NTP pada lima subsektor pertanian menggunakan *coefficient of variation* untuk mengukur disparitas.

Selanjutnya, identifikasi faktor penyebab fluktuasi melalui dekomposisi NTP berdasarkan perubahan IT dan IB yang diintegrasikan dengan data kontekstual. Lalu terakhir dilakukan interpretasi hasil dan formulasi rekomendasi kebijakan berbasis temuan empiris dengan mempertimbangkan karakteristik spesifik setiap subsektor. Penelitian menggunakan Microsoft Excel untuk kompilasi data. Beberapa keterbatasan metodologi meliputi tidak melakukan analisis inferensial dan periode data yang diperoleh relatif singkat hanya selama 8 bulan saja. Meskipun demikian, pendekatan deskriptif yang digunakan tetap mampu memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika NTP dan implikasinya terhadap kesejahteraan petani di Provinsi NTT.

Rumus dasar perhitungan NTP yang digunakan sesuai dengan metodologi BPS adalah:

$$NTP = \frac{IT}{IB} \times 100$$

Dimana:

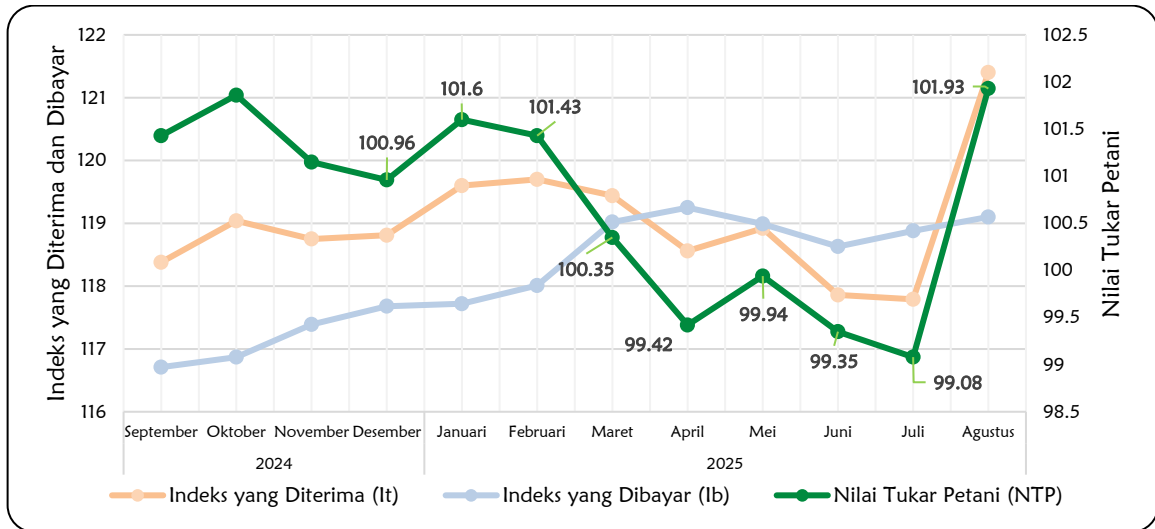
IT = Indeks Harga yang Diterima

IB = Indeks Harga yang Dibayar Petani

3. Hasil dan Pembahasan

Analisis data NTP di Provinsi NTT dari Januari hingga Agustus 2025 memperlihatkan dinamika yang cukup berfluktuasi dengan pola yang penting untuk diteliti lebih lanjut. Berdasarkan gambar 1, pada awal Januari 2025, NTP tercatat sebesar 101,60 yang menunjukkan surplus, di mana pendapatan petani melebihi pengeluarannya. Angka ini meningkat sebesar 0,63 persen dibanding Desember 2024, didorong oleh kenaikan indeks harga terima yang lebih cepat dari indeks harga bayar. Namun, peningkatan ini tidak bertahan lama karena pada Februari 2025 NTP menurun menjadi 101,43, kemudian turun lebih signifikan pada Maret menjadi 100,35, menunjukkan penurunan terbesar selama periode tersebut. Tren penurunan ini berlanjut hingga April dengan NTP di bawah 100 yakni 99,42, menandakan kondisi defisit bagi petani. Meskipun terjadi sedikit pemulihan pada Mei (99,94), penurunan kembali terjadi pada Juni (99,35) dan Juli (99,08), dengan Juli menjadi titik terendah selama periode pengamatan.

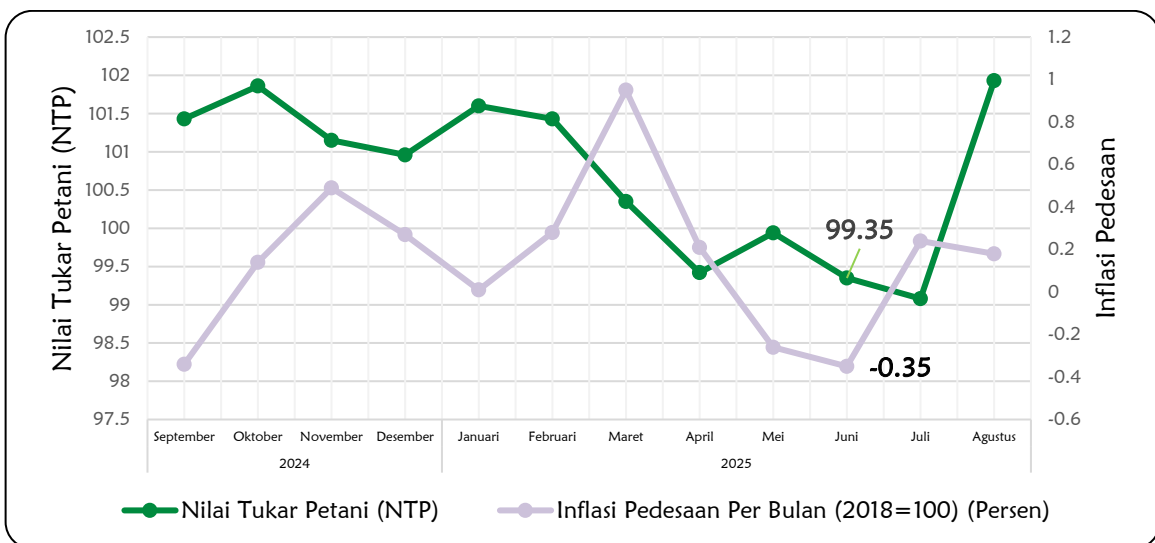
Situasi ini menandai empat bulan berturut-turut (April–Juli) petani mengalami defisit, di mana pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. Namun, pada Agustus 2025 terjadi lonjakan signifikan NTP menjadi 101,93 atau naik 2,88 persen, dipicu oleh kenaikan indeks harga terima yang lebih tajam dibanding indeks harga bayar, mencerminkan perbaikan kondisi pasar hasil pertanian. Perubahan NTP terutama dipengaruhi oleh fluktuasi data IB, dengan kenaikan IB yang melebihi IT pada April hingga Juli 2025 menjadi faktor utama penurunan NTP. Inflasi perdesaan yang terjadi pada kelompok pengeluaran makanan, minuman, dan tembakau memberikan tekanan terhadap daya beli petani.



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (diolah)

Gambar 1. Tren Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2025

Sebaliknya, gambar 2 menunjukkan bahwa deflasi pedesaan seperti yang terjadi pada Juni 2025 sebesar -0,35 persen, meskipun menandakan penurunan harga konsumsi dan secara teori dapat meningkatkan daya beli petani sebagai konsumen, dalam konteks NTT justru berdampak negatif pada indeks harga terima hasil pertanian, sehingga menekan NTP.



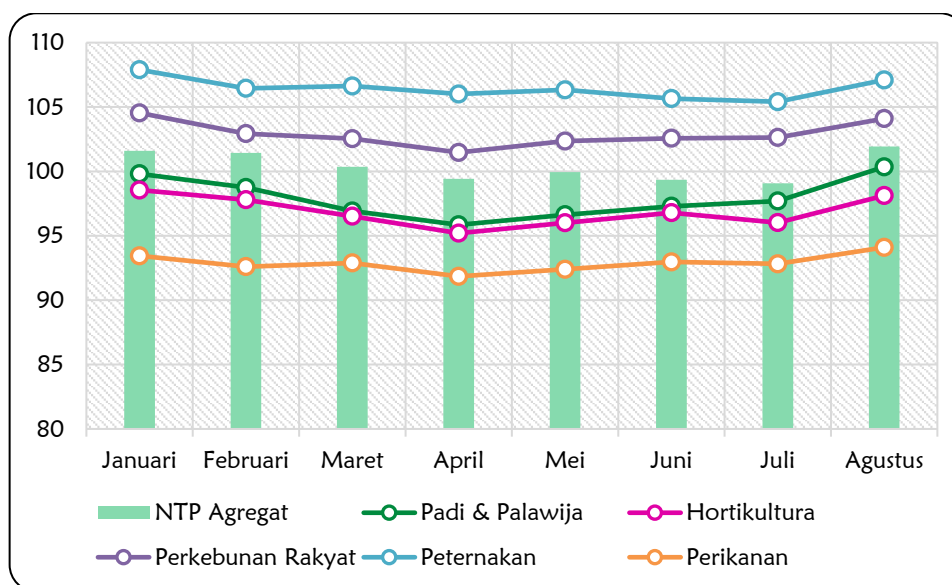
Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (diolah)

Gambar 2. Tren Nilai Tukar Petani dan Inflasi Pedesaan NTT Tahun 2024-2025

Analisis subsektoral menunjukkan disparitas mencolok pada NTP antar subsektor pertanian di Provinsi NTT. Berdasarkan gambar 3, pada Januari 2025, subsektor peternakan menduduki posisi tertinggi dengan NTP 107,89, diikuti oleh tanaman perkebunan rakyat dengan NTP 104,54, yang keduanya berada di atas ambang kesejahteraan (NTP > 100). Sebaliknya, subsektor padi dan palawija (99,81), hortikultura (98,55), dan perikanan (93,44) berada di bawah 100, menandakan defisit bagi sebagian besar pelaku usaha di subsektor tersebut. Kondisi ini tetap konsisten hingga

pertengahan 2025, dengan subsektor peternakan tetap tertinggi dan perikanan berada di posisi terendah.

Tingginya NTP pada subsektor peternakan didukung oleh permintaan stabil akan produk ternak seperti daging babi dan sapi, yang berkaitan erat dengan adat dan budaya masyarakat NTT, serta pola konsumsi protein hewani yang meningkat (Koylal et al., 2023). Penggunaan pakan ternak yang lebih komersial turut meningkatkan produktivitas dan nilai jual ternak. Di sisi lain, subsektor perkebunan rakyat memiliki komoditas unggulan seperti kopi dan jambu mete yang memiliki pasar stabil dan mulai masuk rantai nilai ekspor, memberikan margin keuntungan yang lebih baik. Sebaliknya, perikanan menghadapi kendala infrastruktur, tingginya biaya operasional, dan dominasi tengkulak dalam rantai pemasaran, sehingga pendapatan nelayan relatif rendah. Perubahan iklim yang mempengaruhi musim tangkap juga berkontribusi pada rendahnya indeks harga terima di subsektor perikanan.



Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur (diolah)

Gambar 3. Nilai Tukar Petani Tiap Subsektor

Subsektor padi dan palawija yang mendekati titik impas menghadapi produktivitas rendah (4,62% untuk padi dibandingkan rata-rata nasional 5,31%) serta biaya produksi tinggi yang tidak sepenuhnya tertutupi harga jual gabah. Meskipun kebijakan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) memberikan jaminan harga minimum, keterbatasan infrastruktur dan standar kualitas menghambat akses petani terhadap skema ini. Berdasarkan gambar 3, subsektor hortikultura mengalami volatilitas yang lebih tinggi dibanding subsektor lainnya. Volatilitas ini terutama terjadi pada komoditas seperti cabai rawit yang fluktuasinya ekstrem. Berdasarkan data, komoditas hasil pertanian hortikultura, seperti cabai, menjadi salah satu kontributor terbesar inflasi tiap bulannya. Pada April 2025, cabai rawit menyumbang 0,31% inflasi MoM, diikuti dengan bawang merah dan tomat. Akan tetapi, pada bulan berikutnya, komoditas yang sama justru menjadi salah satu penyumbang deflasi terbesar. Hal ini menunjukkan volatilitas harga

yang cukup tinggi pada komoditas-komoditas hasil tani hortikultura. Penelitian Triwidia et al. (2024) menunjukkan bahwa pada sistem pertanian kering seperti di Provinsi NTT, biaya produksi jagung dan hasil panen sangat menentukan NTP, dan program integratif seperti TJPS paling efektif menaikkan NTP kelompok tertentu melalui efisiensi input produksi dan panen. Secara umum, fluktuasi NTP terbukti dipengaruhi indeks harga yang diterima dan dibayar, serta variabel makro seperti inflasi/deflasi perdesaan dan efisiensi subsektor.

Faktor-faktor yang mempengaruhi fluktuasi NTP meliputi harga input produksi yang meningkat, seperti pupuk dan pestisida, yang meningkatkan biaya produksi tanpa diimbangi kenaikan harga jual produk. Kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahal biaya transportasi akibat kondisi geografis Provinsi NTT memperburuk tekanan biaya petani. Harga output pertanian yang sangat fluktuatif, terutama pada komoditas seperti cabai rawit, juga menjadi faktor penting. Kondisi iklim kering dan ketergantungan pada tadah hujan menyebabkan ketidakpastian produksi, sedangkan fenomena deflasi dan inflasi perdesaan memberikan dampak kompleks terhadap kemampuan daya beli dan pendapatan petani (Koylal et al., 2023)

Secara kontekstual, beberapa faktor memperparah kondisi ini termasuk anomali cuaca El Niño yang menurunkan produktivitas pertanian, kebijakan impor pangan yang berdampak pada harga domestik, serta infrastruktur distribusi yang belum optimal menyebabkan disparitas harga. Temuan baru mengidentifikasi pengaruh perubahan pola konsumsi masyarakat terhadap NTP subsektor peternakan, dimana peningkatan permintaan daging menjelang hari raya keagamaan mampu mendorong kenaikan NTP meskipun secara agregat mengalami penurunan. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam periode penelitian 8 bulan yang membatasi analisis pola musiman utuh, penggunaan data agregat provinsi, serta tidak tersedianya data mikro tingkat petani.

Kebijakan pemerintah seperti subsidi pupuk, Harga Pembelian Pemerintah, serta program bantuan sosial turut berpengaruh namun implementasinya sering terhambat keterbatasan infrastruktur dan geografi yang sulit ditembus di Provinsi NTT. Koordinasi dalam pengendalian inflasi dan stabilisasi harga konsumen harus disinkronkan dengan upaya perlindungan harga produsen untuk menjaga kesejahteraan petani. Struktur pasar yang dikuasai tengkulak dan perantara menyebabkan margin keuntungan yang kecil bagi petani, sehingga penguatan kelembagaan dan pembentukan koperasi menjadi penting dalam meningkatkan posisi tawar petani.

Kondisi defisit NTP selama empat bulan berturut-turut berdampak negatif terhadap kesejahteraan petani, menurunkan daya beli dan kualitas konsumsi pangan yang berisiko memperparah masalah gizi dan stunting di Provinsi NTT. Dampak jangka menengah termasuk pengurangan investasi dalam input produksi yang menurunkan produktivitas, sedangkan dampak jangka panjang berupa potensi eksodus tenaga kerja muda dari sektor pertanian yang dapat memperparah masalah demografis pertanian di Provinsi NTT (Hamjaya et al., 2022).

Disparitas subsektoral NTP menunjukkan perlunya intervensi kebijakan yang spesifik sesuai karakteristik subsektor, terutama pada subsektor perikanan yang memerlukan perhatian lebih besar akibat tantangan struktural dan iklim. Lonjakan NTP pada Agustus 2025 memberikan harapan perbaikan kesejahteraan, namun volatilitas tinggi mengindikasikan kebutuhan intervensi yang bersifat sistemik dan berkelanjutan.

Meskipun sektor pertanian menyumbang sekitar 29% terhadap PDRB Provinsi NTT, kondisi NTP yang sering di bawah 100 menunjukkan adanya paradoks pertumbuhan di mana pertumbuhan ekonomi tidak langsung meningkatkan kesejahteraan petani. Untuk mengatasi hal ini, selain kebijakan harga, peningkatan produktivitas melalui adopsi teknologi, perbaikan irigasi, pelatihan, akses pembiayaan, dan penguatan kelembagaan petani menjadi kunci utama. Fenomena deflasi yang berulang di Provinsi NTT selama 2024 dan awal 2025 mengisyaratkan kelemahan struktural dalam ekonomi perdesaan yang perlu mendapat perhatian khusus agar pendapatan petani tidak tertekan berkepanjangan.

Berdasarkan temuan tersebut, implikasi kebijakan yang direkomendasikan adalah diferensiasi kebijakan dimana subsektor dengan NTP rendah memerlukan intervensi fokus pada efisiensi biaya produksi dan stabilisasi harga output, sementara subsektor berkinerja baik perlu penguatan melalui pengembangan sistem pemasaran yang lebih efisien. Kebijakan penanggulangan dampak perubahan iklim dan penguatan infrastruktur perdesaan menjadi faktor kunci stabilisasi NTP jangka panjang, menekankan pendekatan terintegrasi untuk meningkatkan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Tabel 2. Nilai NTP Agregat dan Lima Subsektor Provinsi NTT Januari-Agustus 2025

Bulan	NTP Agregat	Padi & Palawija	Hortikultura	Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan
Januari	101.60	99.81	98.55	104.54	107.89	93.44
Februari	101.43	98.75	97.80	102.93	106.45	92.60
Maret	100.35	96.92	96.52	102.54	106.63	92.89
April	99.42	95.85	95.20	101.47	106.01	91.85
Mei	99.94	96.63	96.01	102.35	106.33	92.40
Juni	99.35	97.29	96.79	102.57	105.65	92.97
Juli	99.08	97.70	96.02	102.63	105.41	92.82
Agustus	101.93	100.35	98.12	104.10	107.10	94.10
CV	1.96	1.31	1.55	1.22	1.26	1.24

Sumber: BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Simpulan dan Saran

Upaya peningkatan dan stabilisasi NTP di Provinsi NTT memerlukan pendekatan kebijakan komprehensif yang sanggup menjawab akar permasalahan. Langkah pertama berupa stabilisasi harga input dan output melalui penguatan sistem distribusi pupuk bersubsidi yang sanggup menjamin ketersediaan dan keterjangkauan di seluruh wilayah, disertai pembentukan *buffer stock* untuk komoditas strategis yang sanggup menyerap fluktuasi harga pada musim panen raya dan paceklik. Implementasi Harga Pembelian Pemerintah untuk gabah perlu diperkuat dengan memperluas jangkauan pembelian dan menyederhanakan prosedur administrasi yang sanggup mempermudah akses petani.

Penguatan infrastruktur pertanian mampu menjadi tulang punggung peningkatan NTP melalui pengembangan *cold storage* di sentra produksi hortikultura yang sanggup mengurangi kehilangan hasil pascapanen, rehabilitasi sistem irigasi yang sanggup mengatasi ketergantungan pada tadah hujan, serta peningkatan akses jalan desa yang dapat menekan biaya logistik. Intervensi spesifik per subsektor mampu diwujudkan melalui subsidi bahan bakar untuk nelayan, mekanisasi pertanian untuk tanaman pangan, dan pengembangan klaster hortikultura terintegrasi yang sanggup menyinergikan proses produksi hingga pemasaran.

Penguatan kelembagaan petani melalui pemberdayaan kelompok tani dan koperasi mampu meningkatkan posisi tawar, didukung sistem informasi harga *real-time* yang sanggup memberikan akses data pasar secara tepat waktu. Diversifikasi sumber pendapatan melalui integrasi tanaman-ternak dan pengembangan industri pengolahan hasil pertanian dapat membangun ketahanan pendapatan petani terhadap guncangan harga. Akses pembiayaan yang inklusif melalui Kredit Usaha Rakyat dan asuransi pertanian sanggup melindungi petani dari risiko usaha tani.

Koordinasi kebijakan antar sektor dapat memastikan harmonisasi antara kebijakan pengendalian inflasi dengan kepentingan petani produsen. Implementasi seluruh kebijakan ini sanggup berjalan optimal dengan komitmen anggaran yang memadai, koordinasi lintas pemangku kepentingan, serta partisipasi aktif petani dan organisasinya untuk mencapai NTP stabil di atas 100 yang mampu mencerminkan peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Ethics Approval

Seluruh prosedur dalam penelitian ini telah sesuai dengan prinsip-prinsip serta etika publisitas

Conflict of Interest

Penulis menyatakan tidak memiliki konflik kepentingan terkait penelitian ini.

Daftar Pustaka

- [1] Aulia, S. S., & Santiuli, L. C. (2021). Faktor-faktor yang memengaruhi Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Aseanomics*, 6(1), 29-43. <https://doi.org/10.33476/j.e.b.a.v6i1.1925>
- [2] BPS NTT. (2025a). Tren Perkembangan Nilai Tukar Petani Tahun 2025. <https://ntt.bps.go.id/id>
- [3] BPS NTT. (2025b). Tren Nilai Tukar Petani dan Inflasi Perdesaan NTT Tahun 2024-2025. <https://ntt.bps.go.id/id>
- [4] BPS NTT. (2025c). Nilai Tukar Petani Tiap Subsektor. <https://ntt.bps.go.id/id>
- [5] Hablinawati, L., Wilandari, Y., & Safitri, D. (2024). Peramalan Nilai Tukar Petani di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan metode ARIMA. *Jurnal Gaussian*, 13(1), 156-165. <https://doi.org/10.20885/esds.vol2.iss.1.art9>
- [6] Hamjaya, R. G., Rukmana, D., & Lumoindong, Y. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Tanaman Hortikultura Di Sulawesi Selatan. *Agricore: Jurnal Agribisnis Dan Sosial Ekonomi Pertanian Unpad*, 7(1), 36-46. <https://doi.org/10.24198/agricore.v7i1.39467>
- [7] Juliansyah, E. (2024). Agribusiness transformation through Farmers' Terms of Trade analysis: A case study of agricultural subsectors in West Nusa Tenggara 2019-2024. *Aletheia: Jurnal Pengembangan Humaniora, Sains dan Teknologi*, 1(2), 93-104. <https://doi.org/10.63892/aletheia.1.2024.93-104>
- [8] Keumala, C. M., & Zainuddin, Z. (2018). Indikator kesejahteraan petani melalui Nilai Tukar Petani (NTP) dan Pembiayaan Syariah sebagai Solusi. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), 129-149. <https://doi.org/10.21580/economica.2018.9.1.2108>
- [9] Koyslal, J. A., Kuang, S. M., & Abineno, J. C. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Nilai Tukar Petani Sektor Tanaman Pangan Di Nusa Tenggara Timur. *Partner*, 28(1), 17-30. <http://dx.doi.org/10.35726/jp.v28i1.1674>
- [10] Suri, O. T., Olviana, T., Chamdra, S., Nendissa, D. R., & Mahendra, B. (2024). Changes in strategic Foods and Farmers' Terms of Trade that are Causally Related. *Anjoro: International Journal of Agriculture and Business*, 5(2), 98-108. <https://doi.org/10.63892/aletheia.1.2024.93-104>
- [11] Nirmala, A. R., Hanani, N., & Muhaimin, A. W. (2016). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Tukar Petani tanaman pangan di Kabupaten Jombang. *Habitat*, 27(2), 66-71. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2016.027.2.8>
- [12] Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. (2024). Laporan Triwulan I Pengendalian Inflasi Provinsi NTT. Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi NTT. <https://ppidutama.nttprov.go.id/front/dokumen/detail/300355780>

- [13] Triwidia, E., Nuraini, I., Boedirochminarni, A., & Firmansyah, M. (2024). Analisis Pengaruh Produktivitas Padi, Indeks Harga yang Dibayar Petani dan Produksi Padi Terhadap Kesejahteraan Petani di Indonesia". *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 8(2), 213-223. <https://doi.org/10.32487/jshp.v8i2.2086>